

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu Negara kepulauan Indonesia sangatlah luas wilayahnya sehingga dibutuhkan salah satu pembangunan dapat menunjang kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan masyarakat, Sehingga infrastruktur menjadi sebagai salah satu alat pendukung yang baik.

ASCE di Amerika Serikat (1998), telah mempublikasikan beberapa laporan struktur dan sejumlah laporan status yang dimutakhirkan datanya sehingga berpotensi untuk memberi solusi dalam peningkatan infrastruktur pada masa yang akan datang. Laporan infrastruktur tersebut telah disitasi dalam berbagai tulisan artikel dan laporan studi akademik, pemimpin politik telah memanfaatkan untuk membuat kebijakan dalam pengadaan infrastruktur di negara bagiannya. Dalam mengembangkan infrastruktur di negaranya, ASCE telah membentuk panel pakar yang terdiri dari berbagai bidang konstentrasi infrastruktur yang memiliki reputasi nasional untuk menentukan lingkup dan penilaian, juga anggaran yang dibutuhkan.

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, dan bahkan mampu memberikan kesejahteraan penduduk dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan perekonomian suatu wilayah yang didukung oleh pelayanan infrastruktur yang baik, dapat mendorong

peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan penduduknya (Button, 2002 dalam Hadi Wahyono,2006).

Laporan infrastruktur dengan judul *Fragile Foundation: A Report on America's Public Works* (1998), melaporkan isu yang merekomendasi bagaimana negara meningkatkan kemampuan infrastrukturnya dalam melayani kegiatan masyarakat. Untuk memandu studi tersebut, para penulis laporan tersebut menyusun *baseline* untuk mengevaluasi infrastruktur yang terdiri dari delapan kategori infrastruktur dengan memuat tingkatan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas infrastruktur yang ada. Pada tahun 1988, rata-rata nilai infrastruktur masih pada tingkatan C, yang artinya menunjukkan pencapaian berada pada tingkatan cukup. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kemacetan lalu lintas dan kemampuan dalam pemeliharaan untuk menghadapi umur infrastruktur yang semakin tua. Oleh sebab itu maka para anggota komisi mengusulkan investasi fiskal yang dapat menunjang biaya operasi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Sejak dikeluarkannya laporan infrastruktur pada tahun 1988, studi ASCE selanjutnya menunjukkan bahwa pada dekade berikutnya nilai infrastruktur di Amerika semakin parah dan tingkat nilai berkurang rata-ratanya. Berkurangnya tingkatan nilai rata-rata disebabkan oleh menurunnya nilai infrastruktur sekolah, penyedia air bersih, jalan, dan dam. Nilai tersebut mengejutkan anggota komisi, banyak praktisi dan pengamat dari anggota masyarakat yang peduli pada infrastruktur.

Pada laporan tahun 2001, menunjukkan adanya peningkatan ke nilai D+, namun pada tahun 2005 kembali turun ke D. Hasil laporan tersebut diketahui bahwa terjadi hal yang sama pada laporan awal di tahun 1988 yaitu masalah pemeliharaan dan ketidakmampuan penyediaan dana dalam proses pengembangan infrastruktur sehingga ASCE mengusulkan biaya sebesar triliunan dollar untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur beserta pemeliharaannya agar dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. meskipun disadari kecukupan infrastruktur akan membantu aktifitas usaha pembangunan ekonomi masyarakat.

Bila hal ini terjadi di Negara adidaya seperti Amerika Serikat, demikian juga dapat terjadi di Indonesia. Di Negara kita tidak pernah ada studi mengenai infrastruktur, meskipun disadari kecukupan infrastruktur akan membantu aktifitas usaha pembangunan ekonomi masyarakat. Seperti kegiatan *Infrastructure Summit* yang diselenggarakan sejak tahun 2004. Demikian pula kegiatan Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012) kembali diselenggarakan pada tanggal 28-30 Agustus 2012 di Jakarta Convention Center bersamaan dengan Asia Pacific Minister and Regional Governor Convergence on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development 2012 (APM-RGC'12).

Para pemimpin pemerintahan berkumpul dalam acara tersebut selaku pengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk masa depan pembangunan infrastruktur. IIICE2012 memberikan pandangan yang kritikal untuk industry infrastruktur seperti: Energi – Pembangkit Daya dan Distribusi; Teknologi Informasi dan komunikasi; Transportasi – jalan, udara, laut dan air; dan manajemen air dan limbah. Penilai kelayakan infrastruktur adalah suatu

program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya. ASCE sudah membuat Infrastructure Report Card sejak 1988 di USA dan para insinyur di Australia telah mengikuti program yang sama sejak 2001.

Sebagai salah satu Provinsi yang berkembang di Indonesia Provinsi Papua Barat wajib melakukan studi kelayakan terhadap infrastruktur yang ada. Dengan tingkat pelayanan infrastruktur yang masih terbatas dan kurang mendukung sehingga penulisan tugas akhir ini akan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat untuk dapat melihat sejauh mana kemampuan dan potensi infrastruktur dalam menghadapi perkembangan Provinsi dan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

1.3 Tujuan

Menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Papua Barat serta memberikan informasi biaya yang dibutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi :

Pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan (provinsi dan kabupaten), air minum, telekomunikasi, limbah (air, sampah, industri), obyek wisata, sekolah atau universitas, dan energi di Papua Barat.

1.5 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kelayakan infrastrukturnya.
2. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
3. Sebagai tolak ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.